

Pembentukan Tim Pendamping Literasi Daerah dan Penguatan Literasi di Kabupaten Bengkulu Utara

Gumono ^{a,1*}, Sarwit Sarwono ^{a,2}, Didi Yulistio ^{a,3}, Agus Trianto ^{a,4}, Bayu Utomo ^{a,5}

^a Universitas Bengkulu, Jalan W.R.Supratman,Kandang Limun Kota Bengkulu 38371A

¹ gumono@unib.ac.id; ² sarwitsarwono@unib.ac.id; ³ didi_yulistio@unib.ac.id, ⁴ augustrianto@yahoo.com;

⁵ b.utomo@gmail.com

* corresponding author: gumono@unib.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received : Jan, 2024
Revised : Mar, 2024
Accepted : Mar, 2024

Keywords

Literasi;
TPLD;
GLN;

ABSTRACT

This activity aims to manifest Bengkulu University's participation in accelerating the increase in community literacy, especially in the District Bengkulu Utara, Bengkulu Province. Bearing in mind that the results of various surveys and evaluations of the GLN program in North Bengkulu show that the implementation of movement and literacy skills could have been better. This community service is conducted through counseling and focus group discussions to equalize perceptions and form a District Regional Literacy Assistance Team—North Bengkulu to share their role in making GLN a success. The activity was held on August 30, 2022, inviting the Regional Government/Regional Government, District Education Office, Regional Library and Archives Service, Regional Planning and Development Agency (Bappeda), Professional Organizations (MGMP), Academics, and Regional Policy Stakeholders. However, the only participants present were academics, teachers from MGMP elements, and the sub-district head. The analysis results show that strengthening literacy has not become a shared responsibility. Policymakers and stakeholders still think that strengthening literacy skills is the responsibility of schools (teachers) alone. TPLD has not been successfully formed for this activity because parties in the field of literacy have not fully attended it.

A. Pendahuluan

Rendahnya kecakapan literasi juga sesuai dengan rapor pendidikan yang menunjukkan rendahnya performa belajar siswa pada umumnya. Dari jumlah peserta didik pada jenjang SD yang jumlahnya sekitar 25 juta, masih ada 400.000 yang tidak naik kelas dari kelas 1 ke kelas 2. Menjadi ironis karena sebagian besar mereka gagal pada mapel bahasa Indonesia, terutama dalam baca-tulis khususnya membaca pemahaman. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar pendidik guru hanya mengajarkan kepada siswa cara menjawab soal, dan tidak mengembangkan nalar (Kusuma 2018).

Survey *PIRLS 2019 International Results in Reading* melaporkan bahwa Indonesia masih berada pada urutan ke-45 dari 48 negara peserta dengan skor 428 dari skor rata-rata 500. Sedangkan hasil uji literasi membaca dalam PISA 2019 menunjukkan bahwa peserta didik Indonesia masih berada pada peringkat ke-57 dengan skor 396 (skor rata-rata OECD 493). Sementara dalam PISA 2012 dan 2015 prestasinya turun di peringkat ke-64 dari 65 negara yang berpartisipasi (Adnyana, Arnyana, and Margunayasa n.d.).

Hasil evaluasi program GLS di Bengkulu menunjukkan bahwa implementasi gerakan literasi nasional belum diterapkan secara memadai. Penelitian sejenis oleh Setyono dan Heryani (Heryani 2020) juga menunjukkan kurang efektifnya program GLS. Gerakan Literasi Sekolah mayoritas dilaksanakan di luar proses pembelajaran. Hal ini lah yang menyebabkan kemampuan literasi tidak terbina secara sistematis dan intensif. Berdasarkan pada data tersebut, terlihat bahwa permasalahan literasi yang masyarakat Indonesia sudah sangat kompleks dan akut. Terlalu banyak tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah, untuk membangun kecakapan literasi Indonesia berstandar global.

Direktur Jendral PAUD, Dikdas, dan Dikmen telah menerbitkan SK Satgas Gerakan Literasi Sekolah nomor 10984/C/DM.05.03/2021 yang menentukan salah satu tugas barunya adalah melakukan pendampingan kepada Unit Pelaksana Teknis dan Tim Pendamping Literasi Daerah (TPLD). Salah satu unsur penting dalam TPLD adalah kontribusi akademisi dalam penguatan literasi. Akademisi di program magister pendidikan bahasa Indonesia harus dapat menjadi narasumber dan penguat program literasi di daerah, khususnya di Kabupaten Bengkulu Utara.

Upaya yang harus segera dilakukan adalah mengembangkan program literasi di tingkat kabupaten/kota yang komprehensif dan implementatif dalam lingkup di dalam dan di luar pembelajaran. Hal ini menjadi urgen jika mengingat Indonesia kembali akan mengikuti asesmen PISA pada tahun 2022. Oleh sebab itu diperlukan upaya strategis dan nyata agar pembelajaran di sekolah dapat membina dan mengembangkan kemampuan literasi siswa dan masyarakat. Dalam kaitan ini, kegiatan pengabdian pada masyarakat—khususnya pada ujung tombak pelaksanaan kegiatan pembelajaran—tentang bagaimana mengimplementasikan literasi dalam dan di luar pembelajaran menjadi penting.

Masalah utama pelaksana literasi TPLD adalah kurang memahami bagaimana menerapkan literasi dalam dan di luar pembelajaran. Dengan demikian maka rumusan masalah kegiatan ini adalah: bagaimanakah meningkatkan pemahaman Tim Pendamping Literasi Daerah dalam mengimplementasikan penguatan literasi di kabupaten?

B. Kajian Literatur

Definisi tentang literasi mengandung kompleksitas yang cukup tinggi karena berhubungan dengan konteks penggunaannya (Freebody 2007). Jika kita melihat berdasarkan istilah, secara etimologis “literasi” berasal dari kata *litteratus/littera* (bahasa Latin), yang bersinonim dengan *letter* dalam bahasa Inggris, dan dimaknai sebagai kemampuan baca dan tulis. Pada awalnya literasi cenderung diartikan sebagai kemampuan baca dan tulis dan selanjutnya berkembang menjadi kecakapan dalam menguasai bidang pengetahuan tertentu. Orang yang memiliki kemampuan khas tersebut bisanya disebut literet (dari *literate*) bermakna bahwa yang bersangkutan memiliki tingkat pendidikan tinggi, memiliki kemampuan membaca yang baik, terpelajar, sarjana, bersekolah, berpengetahuan luas, intelek, terdidik, terpelajar, kaya informasi, atau berbudaya.

Sementara UNESCO *Education Sector* mendefinisikan literasi adalah kecakapan mengidentifikasi, menafsirkan, memahami, mengkreasi, mengkomunikasikan, dan menghitung memanfaatkan bahan-bahan tertulis dan variannya (Montoya 2018). Secara lebih komprehensif, Koiichiro Matsuura menguraikan literasi bukan membaca dan menulis saja, namun mencakup juga bagaimana cara masyarakat berkomunikasi pada kehidupan keseharian, literasi berkaitan dengan aspek pengetahuan, aspek bahasa, dan aspek budaya (Matsuura 2005).

Newfoundland Labrador Education yang dikutip Nirmala juga menegaskan bahwa literasi bukan hanya keterampilan baca dan nulis, melainkan juga dipakai untuk kemampuan digital dan interaksi seseorang dalam beberapa konteks, misalnya 1) pemahaman makna pesan dalam proses komunikasi, 2) koneksi antar teks, 3) *critical analisis* dan *problem solving*, 4) menciptakan ragam teks, 5) membaca untuk hiburan, dan 6) partisipasi dalam kegiatan sosial budaya (Nirmala, Rahman, and Musthafa 2018).

Grand design Gerakan Literasi Sekolah mendefinisikan literasi tidak hanya diukur dari kegiatan baca dan tulis, akan tetapi juga meliputi kecakapan memanfaatkan ragam sumber pengetahuan cetak, audio, visual, dan digital. Definisi tersebut senada dengan konsep literasi informasi (*information literacy*). Clay dan Ferguson (www.bibliotech.us/pdfs/InfoLit.pdf), seperti dikutip dalam Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah (Wiedarti, Laksono, and Retnaningsih 2018), merinci komponen literasi informasi terdiri atas literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual.

Dalam perspektif pendidikan, literasi dimaknai sebagai keterampilan berbahasa untuk proses berpikir. Empat keterampilan berbahasa (mendengar, berbicara, membaca dan menulis) digunakan dalam proses komunikasi, baik secara reseptif (untuk menangkap/memahami pesan) dan secara produktif (untuk menuangkan/ menyampaikan gagasan). Ogle, dkk. Dalam bukunya *Building Literacy in Social Studies: Strategies for Improving Comprehension and Critical Thinking* menjelaskan literasi merupakan strategi meningkatkan pemahaman dan berpikir kritis (Ogle, Klemp, and McBride 2007)

Definisi yang diajukan ini berupaya untuk mencakupi beberapa dimensi literasi yang berbeda-beda. Pluralitas literasi merujuk kepada banyak cara literasi dimanfaatkan dan hubungannya kepada banyak hal dalam masyarakat sepanjang hidup individu. Orang memperoleh dan menerapkan literasi untuk tujuan berbeda dalam situasi berbeda, yang semuanya dibentuk oleh faktor budaya, sejarah, bahasa, agama, dan sosial ekonomi. Makna plural literasi berdasarkan tujuan dan situasi berbeda ini.

Literasi dalam pembelajaran merupakan literasi sebagai kemampuan. Kemampuan literasi dalam pembelajaran adalah fondasi semua pembelajaran. Pada akhirnya, literasi menjadi dasar untuk mengembangkan diri secara mandiri, yaitu kemampuan belajar sepanjang hayat. Kemampuan inilah yang menjadi tujuan dalam kurikulum nasional.

Namun demikian, hasil dari segala upaya yang telah dilaksanakan melalui kurikulum pendidikan, masih belum menggembirakan (Listanto and Firmansyah 2022). *Program for International Student Assessment (PISA)* mengungkapkan bahwa literasi membaca siswa Indonesia umur 15 tahun pada tahun 2015 berada di urutan ke-64 dari 72 negara. Selanjutnya, pada tahun 2018 skor PISA untuk Indonesia tidak jauh berbeda dengan penilaian PISA tahun-tahun sebelumnya, dimana Indonesia selalu berada di 10 besar terbawah. Tahun 2018, hasil PISA Indonesia menduduki peringkat ke-74 dari 79 negara peserta. Hasil serupa dari kajian yang dilakukan dalam lingkup nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengungkapkan bahwa Indeks Alibaca termasuk dalam kategori kegiatan literasi dangkal, yaitu 37,32. Nilai tersebut tersusun dari indeks empat dimensi yaitu Indeks Dimensi Keterampilan sebesar 75,92; Indeks Dimensi Akses 23,09; Indeks Dimensi Alternatif sebesar 40,49; dan Indeks Dimensi Budaya sebesar 28,50 (Solihin *et al.* 2019). Kajian lain juga menyebutkan bahwa kemampuan literasi anak sekolah Indonesia masih tergolong rendah dan harus ditingkatkan. Hal itu berdasarkan laporan dari Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menguji keterampilan membaca, matematika, dan sains siswa kelas IV SD, mereka menemukan bahwa, terutama dalam membaca, hasilnya adalah 46,83% dalam kategori buruk, 6,06% dalam kategori baik, dan 47,11% dalam kategori sangat baik.

Menimbang urgensi dan kondisi empiris literasi bangsa, perlu sinergi berbagai pemangku kebijakan pada semua jenjang. Untuk mewujudkannya, perlu dibentuk Tim Pendamping Literasi Daerah (TPLD) sebagai lembaga kerjasama para pemangku kepentingan di daerah dan Tim Literasi Sekolah (TLS) untuk menguatkan implementasi literasi di sekolah, sebagai bagian mewujudkan Visi Pendidikan Indonesia. Peran BPMP, PP/BP PAUD & Dikmas, serta Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota sangat dibutuhkan untuk menguatkan pendampingan literasi di satuan pendidikan.

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 6 ayat (1) dinyatakan: “Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar difokuskan pada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi peserta didik”. Inilah salah satu dasar pemikiran perlunya penguatan dengan membentuk TPLD di berbagai daerah di Indonesia. Adanya TPLD dan TLS sangat penting dalam penguatan literasi dan numerasi di sekolah. Berdasarkan pertimbangan ini, tim Universitas Bengkulu menginisiasi pembentukan TPLD di kab./kota provinsi Bengkulu. Pada kesempatan ini, pembentukan TPLD dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Utara.

C. Metode

Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat mitra sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam PkM ini ditetapkan metode penyelesaian masalah yaitu dengan melakukan penyuluhan dan bimbingan teknis sehingga TPLD memiliki pemahaman menerapkan literasi dalam dan di luar pembelajaran secara intensif dan terencana.

Khalayak sasaran yang diundang pada kegiatan PkM ini adalah unsur Pemerintah Daerah/Pemda terdiri atas: Dinas Pendidikan Kab. Bengkulu Utara, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Bengkulu Utara, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Bengkulu Utara, dan Camat kecamatan Kota Argamakmur Kab. Bengkulu Utara. Selain itu juga Organisasi Profesi Guru yaitu Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) tingkat SMP/ sederajat untuk semua mata pelajaran, dan akademisi.

Dari semua khalayak sasaran yang diundang dan hadir pada kegiatan lokakarya pembentukan TPLD yang dilaksanakan pada hari Selasa 30 hanya unsur: 1) akademisi (Dr. Agus Trianto, M.Pd.; Dr. Gumono, M.Pd. Prof. Dr. Sarwit Sarwono, M.Hum, Dr. Didi Yulistio, M.Pd. dan Bayu Utomo, S.Pd); 2) Camat Kota Argamakmur (Bp. Amin Makhmud, S.E.) dan 3) Guru yang tergabung dalam Organisasi Profesi Guru (MGMP Bahasa Indonesia, MGMP IPA, dan MGMP Matematika).

D. Hasil dan Pembahasan

Hasil kegiatan

Kegiatan PkM diawali dengan koordinasi dengan para pihak yang menjadi pengampu kebijakan dalam peningkatan literasi. Koordinasi dilakukan secara daring melalui media sosial dan surel. Tujuan koordinasi adalah menjelaskan tujuan pelaksanaan kegiatan dan membuat kesepakatan teknis kegiatan. PkM dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan teknis.

Para pihak yang terlibat koordinasi teknis adalah unsur Pemerintah Daerah terdiri atas: Dinas Pendidikan Kab. Bengkulu Utara, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Bengkulu Utara, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Bengkulu Utara, dan Camat kecamatan Kota Argamakmur Kab. Bengkulu Utara. Selain itu juga Organisasi Profesi Guru yaitu Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) tingkat SMP/ sederajat untuk semua mata pelajaran, dan akademisi.

Hasil koordinasi adalah waktu pelaksanaan kegiatan 30 Agustus 2022 mulai pukul 09.00 s.d. selesai, dengan tempat penyelenggaraan kegiatan disepakati di SMPN 1 Bengkulu Utara. Seluruh unsur pengampu kebijakan lintas instansi pada bidang pengembangan literasi di Bengkulu Utara, diundang untuk hadir.



Gambar 1. Penyuluhan dan Pendampingan Pembentukan TPLD Kab. Bengkulu Utara

Sesuai kesepakatan, kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa 30 Agustus 2022 bertempat di Aula Pertemuan SMPN 1 Bengkulu Utara. Kegiatan dihadiri oleh Tim PkM Universitas Bengkulu terdiri atas Dr. Gumono, M.Pd., Prof. Dr. Sarwit Sarwono, M.Hum., Dr. Didi Yulistio, M.Pd., Dr. Agus Trianto, M.Pd., dan melibatkan satu mahasiswa yakni Sdr. Bayu Utomo. S.Pd. Selain unsur akademisi, kegiatan ini juga dihadiri oleh Camat Kota Argamakmur, Kab. Bengkulu Utara (Bp. Amin Makhmud, S.E.) dan para guru yang tergabung dalam Organisasi Profesi Guru (MGMP Bahasa Indonesia, MGMP IPA, dan MGMP Matematika). Pemangku kebijakan lain belum menghadiri kegiatan yang sangat strategis ini.

Setelah prosesi pembukaan, penyuluhan dimulai dengan penyamaan persepsi perihal literasi. Materi disampaikan oleh Prof. Dr. Sarwit Sarwono, M.Hum. Dalam sajian ini, literasi dimaknai sebagai kemampuan berbahasa dan pemanfaatannya untuk berpikir (Trianto and Heryani 2021). Literasi menyangkut semua kemampuan untuk mengakses, mengskplorasi, mengiden-tifikasi, memproses, memperhitungkan, mempertanyakan, memahami, menginterpretasi, mengevaluasi, menggunakan, mengekspresikan, menciptakan, dan mengko-munikasikan.



Gambar 2. Prof. Dr. Sarwit Sarwono, M.Hum., menyamakan persepsi tentang literasi

Diskusi penyuluhan berlangsung hangat karena menarik peserta untuk interaktif. Sebagian besar peserta memaknai pendidikan literasi sebatas pembelajaran membaca dan menulis. Perspektif baru ini kemudian berimplikasi pada pemahaman peserta terhadap kemampuan literasi lain, misalnya literasi sains, literasi finansial, literasi lingkungan, literasi budaya, literasi digital dan lain-lain.

Materi berikutnya yang disajikan dalam penyuluhan ini adalah “Literasi dalam Pembelajaran” yang dibawakan oleh Dr. Agus Trianto, M.Pd. Paparan materi ini melanjutkan sajian materi sebelumnya, dengan fokus pada pendidikan/pembentukan literasi di lembaga pendidikan formal. Materi yang disuluhkan oleh penyaji memetakan peran masing-masing pengampu kebijakan dalam mengembangkan literasi. Risalah materi adalah sebagai berikut.

Guru berperan merancang pembelajaran berbasis literasi yang membutuhkan banyak banyak bacaan yang menunjang untuk pembelajaran bermutu. Pembelajaran wajib terlaksana dalam sumber belajar (terutama bahan bacaan) yang melimpah. Kemampuan literasi akan berkembang semakin baik jika semua pembelajaran mata pelajaran mengembangkan model pembelajaran berbasis literasi. Program literasi bukanlah program di luar pembelajaran. Oleh sebab itu, semua guru mata pelajaran wajib memahami pembelajaran berbasis literasi

Salah satu unsur utama pendidikan adalah perpustakaan. Pustakawan dalam pembentukan literasi sangat vital. Pustakawan harus merencanakan pengembangan koleksi dan kegiatan untuk mendukung proses pembelajaran pada semua mata pelajaran. Koleksi perpustakaan mesti dapat dipergunakan oleh guru dan siswa secara optimal. Jumlah dan mutu koleksi perpustakaan akan sangat menentukan keberhasilan pembelajaran literasi.

Keunggulan sekolah akan meningkat secara berkesinambungan jika kemampuan literasi terus

tumbuh. Pada tataran ini, peran kepala sekolah juga sangat menentukan. Pengembangan literasi akan tumbuh pesat jika kepala sekolah mendukung pengembangan ekosistem literasi, meliputi kebijakan sekolah, koleksi perpustakaan, dan fasilitas pembelajaran lainnya.

Penentu vital lainnya adalah pengampu kebijakan daerah, dalam hal ini pemerintah di daerah. Seperti telah dijelaskan, sekolah mustahil dapat bergerak sendiri, ekosistem literasi harus terbentuk dan dikendalikan oleh pemerintah daerah. Organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengembangan literasi, harus merumuskan rencana aksi bersama yang seiring dan sejalan dengan gerakan literasi yang dilaksanakan di sekolah.



Gambar 3. Dr. Agus Trianto, M.Pd., menyajikan materi literasi dalam pembelajaran.

Stakeholder penentu keberhasilan terakhir adalah masyarakat. Atmosfir akademik yang selaras antara pendidikan dan lingkungan masyarakat amat menentukan keberhasilan program literasi. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, orang tua dan komponen kemasyarakatan lain dalam kehidupan sehari-hari akan sangat menentukan berkembang atau tidaknya penyediaan kemampuan literasi secara formal di sekolah. Dengan kata lain semua pengampu kebijakan di daerah harus mencari irisan dan mengambil peran dalam pengembangan kemampuan literasi.

Materi berikutnya yang disajikan, setelah materi literasi dalam pembelajaran adalah pemetaan tugas dan tanggung jawab para pengampu kebijakan dan pengampu kepentingan di daerah. Materi ini disajikan oleh Dr. Gumono, M.Pd., dengan judul sajian “Penguatan Tim Pendamping Literasi Daerah Paud & Dikmas”. Risalah materi yang disajikan adalah sebagai berikut.

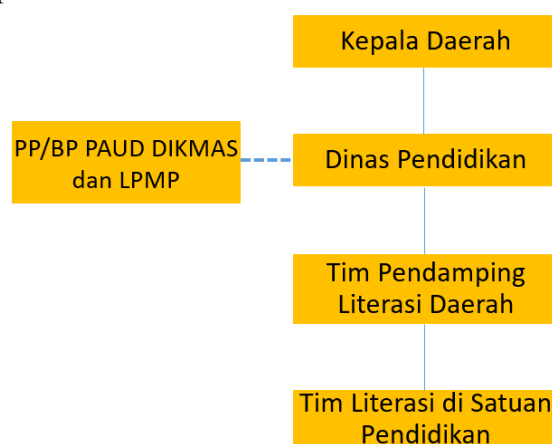
Tim Pendamping Literasi Daerah (TPLD) adalah sistem pendukung yang memiliki peran sentral dalam mendorong sekolah dan Pemerintah Daerah sebagai motor penggerak pendidikan. TPLD memberi masukan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan akselerasi kebijakan terkait pendidikan terutama Penguatan Literasi dan Numerasi untuk mengatasi dampak *learning loss*. Selain itu, TPLD juga mendorong setiap satuan pendidikan untuk membentuk Tim Literasi.

Dasar regulasi pembentukan Tim Pendamping Literasi Daerah (TPLD) adalah: 1) PERATURAN PRESIDEN NO. 18 TAHUN 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Perpres tersebut memberikan arah kebijakan dan strategi peningkatan budaya literasi yaitu: a) pengembangan budaya kegemaran membaca; b) pengembangan perbukuan dan penguatan konten literasi; dan c) peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. 2) PERATURAN PEMERINTAH NO. 57 TAHUN 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada Pasal 6 ayat (1) berbunyi: Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar difokuskan pada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi Peserta Didik; 3) PERMENDIKBUD NO. 22 TAHUN 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024, yang

menegaskan arah kebijakan Renstra Kementerian adalah peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas, dengan strategi pencapaian: 1. peningkatan budaya literasi; 2. pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; dan 3. penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi; dan 4) PERMENDIKBUD NO. 23 TAHUN 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, dimana pada Lampiran butir VI menegaskan menggunakan 15 menit sebelum hari pembelajaran untuk membaca buku selain buku mata pelajaran (setiap hari)(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020).

Berdasarkan dasar hukum di atas, unsur TPLD terdiri atas: PP/BP PAUD dan Dikmas; LPMP (sekarang BPMP); Dinas Pendidikan Provinsi/Kab./Kota; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah; Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda); Pegiat literasi; Taman Bacaan Masyarakat; Komunitas Literasi; Penerbit; Organisasi Profesi; Akademisi; Dunia Usaha dan Dunia Industri; dan pemangku lain sesuai kebutuhan daerah (Muldian, Ikhwanudin, and Antoro 2021).

Struktur TPLD dapat divisualkan sbb:



Gambar 4. Struktur TPLD

Secara normatif, TPLD memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam mengembangkan literasi di daerah, meliputi: 1) Pemetaan: yaitu melakukan pemetaan terhadap kebutuhan di lapangan dalam rangka penguatan literasi dan numerasi di satuan pendidikan berdasarkan kondisi dan situasi di daerah. 2) Asesmen: yaitu membantu Tim Literasi melakukan asesmen untuk mempersiapkan satuan pendidikan menyongsong masa normal selanjutnya; 3) Advokasi: yaitu membekali dan membantu Tim Literasi merancang strategi yang taktis dan efektif dalam penguatan literasi dan numerasi pada masa normal selanjutnya; 4) Dukungan: yaitu memotivasi dan mendorong Tim Literasi dalam bentuk dukungan psikologis untuk bersiap dalam menyongsong masa normal selanjutnya; 5) Monev: yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan program di lapangan; dan 6) Laporan: yaitu memberikan laporan kepada kepala daerah berdasarkan temuan di lapangan untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.



Gambar 5. Dr. Gumono, M.Pd. menyajikan materi pembentukan TPLD

Selain penyajian materi, penyuluhan juga diisi dengan curah pendapat dengan peserta dipimpin oleh Dr. Didi Yulistio, M.Pd.. Terungkap dalam *brainstorming*, sebagian besar peserta awalnya berasumsi bahwa kemampuan literasi hanya terkait dengan kecakapan baca-tulis. Melalui kegiatan ini, terutama para guru di luar mapel Bahasa Indonesia yang hadir, menyatakan sangat berterima kasih karena membuka cakrawala pengetahuan mereka.



Gambar 6. Curah pendapat pemateri dengan peserta

Setelah dilakukan tanya jawab curah pendapat, agenda kegiatan berikutnya adalah pembentukan draft TPLD. Namun mengingat pengampu kebijakan yang hadir pada kegiatan ini belum memenuhi unsur-unsur utama, draft TPLD belum dapat disusun. Sebagai langkah awal pembentukan TPLD, pada kegiatan ini ditanda-tangani Perjanjian Kerjasama Sama antara Universitas Bengkulu dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP): Bahasa Indonesia, IPA, dan Matematika, SMP Negeri 1 Bengkulu Utara, dan Camat Kota Argamakmur. PKS menjadi payung hukum pelaksanaan kolaborasi kegiatan tri dharma perguruan tinggi di wilayah Kecamatan Kota Argamakmur Kab. Bengkulu Utara. Termasuk di dalamnya pembentukan TPLD di Kab. Bengkulu Utara.



Gambar 7. Perjanjian Kerjasama antara Univ. Bengkulu dengan MGMP: Bahasa Indonesia, IPA, dan Matematika, SMP Negeri 1 Bengkulu Utara, dan Camat Kota Argamakmur.

Rekaman audio visual pelaksanaan PkM ini dapat dicermati pada kanal YouTube pada tautan berikut: https://youtu.be/64y1FUe_G7s

Pembahasan

Secara umum kegiatan PkM telah mencapai sebagian tujuan yang ditetapkan. Dengan indikator capaian berupa bertambahnya pengetahuan dan munculnya kesadaran kolektif guru dan sekolah akan urgensi pengembangan literasi oleh semua pihak untuk keberhasilan pendidikan.

Namun, tujuan utama pembentukan TPLD masih belum tercapai. Sinergi antarpemangku kepentingan agar dapat menjembatani sekolah dengan pemangku kunci yang memiliki otoritas penuh dalam mengeluarkan kebijakan terkait dengan isu pendidikan, belum tercapai. Pemangku kunci dalam konteks ini adalah organ pemerintah daerah, DPR, DUDI, pegiat literasi dan masyarakat (Muldian et al. 2021). Pada kegiatan PkM ini, unsur pemerintah daerah yang hadir hanya Camat yang membawahi SMPN 1 Kota Argamakmur Kab. Bengkulu Utara, tempat kegiatan.

Untuk mencapai tujuan utama, upaya simultan harus dilakukan, dengan terus menerus menstimulasi pengampu kebijakan dan pengampu kepentingan terus bergerak meningkatkan literasi masyarakat melalui TPLD, sejalan dengan Gerakan Literasi Sekolah. Dengan demikian diharapkan dapat lahir dan tumbuh simpul-simpul masyarakat yang mempunyai kemampuan literasi tingkat tinggi. Oleh karena itu, kegiatan yang dikembangkan dalam Gerakan Literasi Masyarakat adalah kegiatan yang mencakup enam literasi, yaitu literasi baca-tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, serta literasi budaya dan kewargaan (Tim GLN Kemendikbud 2017).

Guru dan sekolah sebagai garda terdepan penumbuhan kemampuan literasi, harus secara terus-menerus mendapat kesempatan untuk mengembangkan kapasitas. Guru memiliki potensi yang luar biasa dalam pengembangan literasi sekolah, ia adalah tokoh sentral dalam kegiatan literasi, ia adalah peneliti ideal dalam literasi sekolah, dan ia adalah teladan bagi siswa dalam berliterasi (Amilia 2018).

Tentu saja penguatan kapasitas guru dalam pengembangan literasi, harus didukung oleh pengampu kebijakan lain. Ekosistem literasi harus terbentuk (Budiharto, Triyono, and Suparman 2018), bahkan mesti sudah dilakukan sejak pendidikan usia dini (Dewi and Masitoh 2022).

E. Kesimpulan

Gerakan besar perlu diprioritaskan dalam hal peningkatan mutu sumber daya manusia sebagai indikator kunci peningkatan daya saing bangsa. Gerakan dimaksud adalah pengembangan

kemampuan literasi bangsa. Mengingat data internasional terkait SDM menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Indonesia saat ini berada pada peringkat mengah ke bawah.

Kunci utama untuk mencapai keberhasilan gerakan besar tersebut adalah kolaborasi dan kemitraan. Di ranah birokrasi dan pemerintahan, bentuk kolaborasi dan kemitraan yang penting dilakukan adalah pelibatan sebanyak mungkin pemangku kepentingan di tingkat Pusat, Daerah (Pemda), dan masyarakat (profesional, akademisi, praktisi, pegiat, dan tokoh masyarakat). Setiap unsur memiliki posisi dan kontribusi yang setara serta saling melengkapi. Tim Pendamping Literasi Daerah (TPLD) dapat menjadi medium kolaborasi strategis. Menimbang hal ini dilaksanakan PkM Universitas Bengkulu untuk pembentukan TPLD di Kab. Bengkulu Utara.

Pendampingan pembentukan TPLD di Bengkulu Utara berhasil membuka cakrawala pengampu kepentingan, terutama para guru, bahwa literasi bukan hanya tentang kemampuan baca-tulis, namun menyangkut deviasi yang lebih luas, yakni berbahasa dan berpikir. Namun TPLD belum dapat dibentuk karena unsur-unsur utama TPLD belum lengkap. Kegiatan pembentukan hanya dihadiri unsur akademisi, organisasi profesi guru, dan unsur pemerintah kecamatan Argamakmur Bengkulu Utara.

Menimbang tujuan kegiatan belum tercapai secara keseluruhan, tim pelaksana PkM Universitas Bengkulu menyampaikan saran:

1. Perlu dilanjutkan usaha sistematis pembentukan TPLD di Kab. Bengkulu Utara dengan langkah sistematis dan berkelanjutan mengajak semua pengampu kebijakan di Kab. Bengkulu Utara mengambil peran dalam penguatan literasi di daerah.
2. Guru dan sekolah menguatkan peran sebagai motor penggerak penguatan dan pengembangan literasi di masyarakat.

F. Ucapan Terima Kasih

Atas terselenggaranya dengan baik kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, tim pelaksana menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada FKIP Universitas Bengkulu yang menyediakan fasilitas pembiayaan melalui DIPA/RBA FKIP UNIB Tahun 2022 Nomor Kontrak 3050/UN.30.7/PM/2022 tanggal 6 Juni 2022. Selain itu, atas kerjasama yang baik, juga disampaikan terima kasih kepada Camat Kec. Kota Argamakmur Bengkulu Utara, keluarga besar SMPN 1 Bengkulu Utara, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP): Bahasa Indonesia, IPA, dan Matematika SMP/M.Ts. Kab. Bengkulu Utara.

G. References

- Adnyana, I. Made, Ida Bagus Putu Arnyana, and I. Gede Margunayasa. n.d. "Media Literasi Fonik Digital Untuk Mendukung Kemampuan Membaca Permulaan Peserta Didik Kelas I Di Sekolah Bilingual Multikultural."
- Amilia, Fitri. 2018. "Peran Guru Dalam Pengembangan Literasi Sekolah." Pp. 15–22 in *Prosiding Seminar Dan Workshop Nasional Metodologi Penelitian Pendidikan*. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya: Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Budiharto, Budiharto, Triyono Triyono, and Suparman Suparman. 2018. "LITERASI SEKOLAH SEBAGAI UPAYA PENCIPTAAN MASYARAKAT PEBELAJAR YANG BERDAMPAK PADA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN." *SEUNEUBOK LADA: Jurnal ilmu-ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan* 5(2):153–66.

- Dewi, Santi Riana, and Martina Rahmawati Masitoh. 2022. "Membangun Budaya Literasi sejak Dini untuk Mewujudkan Insan yang Kompeten dan Unggul." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2(6):815–21. doi: 10.52436/1.jpmi.890.
- Freebody, Peter. 2007. *Literacy Education in School: Research Perspectives from the Past, for the Future*. Camberwell, Vic: ACER Press.
- Heryani, Rina. 2020. "PENGEMBANGAN PROGRAM LITERASI KOMPREHENSIF BERBASIS LITERASI INTEGRAL UNTUK PENGUATAN GERAKAN LITERASI SEKOLAH DI SMP KOTA CIMAHI."
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. "Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2020-2024."
- Kusuma, Mawar. 2018. "Fantasi Habsari." *kompas.id*. Retrieved December 22, 2022 (<https://www.kompas.id/baca/utama/2018/10/07/fantasi-habsari/>).
- Listanto, Virgiawan, and Nurhuda Firmansyah. 2022. "The Trend of Library Development in Indonesia and the Effects on Literacy Skills in Schools." *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran* 8(3):508. doi: 10.33394/jk.v8i3.5643.
- Matsuura, Koïchiro. 2005. "Appendix I UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity." *Diogenes* 52(1):141–45.
- Montoya, Silvia. 2018. "Defining Literacy." Pp. 17–18 in.
- Muldian, Wien, Trisno Ikhwanudin, and Billy Antoro. 2021. *PERAN DAN STRATEGI TIM PENDAMPING LITERASI DAERAH*. Cetakan I. edited by S. Simatupang. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
- Nirmala, Sri Dewi, R. Rahman, and B. Musthafa. 2018. "Students' Elementary Literacy Skill And Critical Thinking Skill Supported By School Literacy Program (SLP)." *Journal of Teaching and Learning In Elementary Education (JTLEE)* 1(2):92–97.
- Ogle, Donna, Ronald M. Klemp, and Bill McBride. 2007. *Building Literacy in Social Studies: Strategies for Improving Comprehension and Critical Thinking*. ASCD.
- Solihin, Lukman, Bakti Utama, Indah Pratiwi, and Novirina Novirina. 2019. "Indeks Aktivitas Literasi Membaca 34 Provinsi."
- Tim GLN Kemendikbud. 2017. *Peta Jalan Gerakan Literasi Nasional*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Trianto, Agus, and Rina Heryani. 2021. *Literasi 4.0: Teori Dan Program*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Wiedarti, Pangesti, Kisyani Laksono, and Pratiwi Retnaningsih. 2018. "Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah."